

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Bentuk Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Usaha Kerajinan Batu Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Lembang Tampung Cinae Kec. Tanete Riaja Kab. Barru

Pemerintah merupakan pemimpin bagi masyarakatnya, sebagaimana dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengandung prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah mempunyai peran serta fungsi yang sangat besar dalam memajukan dan meningkatkan daerah terutama pada bagian dari perekonomian masyarakatnya agar menjadi hidup yang sejahtera. Pemerintah di hadapkan bagaimana mengurus urusan dan mengayomi masyarakat yang terkait pada daerahnya apa lagi yang terkait dengan persoalan rumah tangga di suatu wilayahnya. Pemerintah harus mampu menyelesaikannya. Kesejahteraan tidak dapat di wujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Fungsi pemerintah yang melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan. Pengaturan dalam arti menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan yang kolektif, agar terdapat kepastian dan perilaku yang memberikan kemanfaatan pada kepentingan umum. Pelayanan terhadap hak-hak masyarakat berisi kekuatan untuk memudahkan masyarakat menikmati hidupnya yang patut atau pantas sesuai dengan nilai-nilai dan martabat kemanusiannya. Sedangkan pelayanan terhadap kewajiban masyarakat berisi kegiatan untuk memungkinkan masyarakat memahami kepatuhan kolektif yang semestinya dikembangkan.<sup>1</sup>Pada peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Barru. Pada Bab II Pasal 2 ayat 4 ada beberapa hal atau bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah, terdiri atas 31 bidang urusan pemerintahan salah

---

<sup>1</sup>Muchils Hamdi, *Bunga Rampai Pemerintahan*, (Bandung: Yarsif Watampone 2002), h. 8.

satunya adalah usaha kecil dan menengah serta perindustrian. Urusan yang sangat harus di perhatikan pemerintah daerah karena dapat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun harus di sesuaikan dengan kondisi wilayah suatu daerah, apa potensi unggulan yang dimiliki sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan terutama meningkatkan perekonomian. Salah satu daerah di Kabupaten Barru, di Kecamatan Tanete Riaja tepatnya di Desa Lempang Tampung Cinae ada potensi alam yang sangat melimpah yaitu batu tatakan, adapun bentuk peran yang diberikan pemerintah dalam hal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam usaha kerajinan batu sebagai berikut:

#### **4.1.1 Bantuan Modal**

Modal merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki, jika memiliki modal usaha kecil maupun menengah dapat berkembang, usaha yang besar membuat peluang untuk dapat mengembangkan usaha menjadi terbuka dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun untuk mendapatkan modal usaha mempunyai syarat tertentu. Adapun syaratnya yaitu mempunyai usaha, kartu keluarga, dan foto copy KTP.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herawati, SE. Sebagai kepala seksi pengembangan IKM menyatakan bahwa:

“Bantuan pemerintah daerah pada pelaku UMKM sebesar 1000.000 per pelaku usaha. Kemudian persyaratannya harus terpenuhi, harus punya KTP, domisili juga harus di Kabupaten Barru, dan kartu keluarga, yang paling utama harus punya usaha.”<sup>2</sup>

Hasil wawancara bahwa pemerintah daerah memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha khususnya pengrajin dengan memperhatikan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu karena syarat ini merupakan administrasi dalam pengambilan modal usaha yang diberikan dan digunakan sebaik mungkin untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>2</sup>Herawati, Kepala Seksi Pengembangan IKM, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, *wawancara* oleh penulis di kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Barru 9 September 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah staf kantor Desa Lempang menyatakan bahwa:

“Kebanyakan masyarakat disini sebagai pengrajin batu dari dulu sampai sekarang, dan ada sekitar 30 usaha masyarakat yang menjual kerajinan batu, kami membantu pengrajin maupun pengusaha dalam membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), atau SKU (Surat Keterangan Usaha) nantinya para pengusaha membuat ini dipakai untuk persyaratan mengambil modal di koperasi atau bank.”<sup>3</sup>

Hasil wawancara bahwa pemerintah daerah memfasilitasi para pengrajin dan penjual kerajinan batu dalam memperoleh modal usahanya melalui bidang keuangan baik itu koperasi yang ada di daerah maupun keuangan perbankan lainnya salah satunya adalah bank yaitu melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat). Karena surat keterangan usaha ini wajib dimiliki atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh para penjual karena surat tersebut menerangkan bahwa orang yang namanya tertera dalam surat benar merupakan penduduk di daerah Kabupaten Barru dan benar memiliki usaha yang disebutkan dalam surat tersebut. Surat inilah yang memperkuat kepemilikan dari suatu usaha yang dapat membantu dalam permodalan dan menjaga lingkungan persaingan usaha yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah stafkantor Desa Lempang menyatakan bahwa:

“Kalau ingin membuat SKU, kita sampaikan ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke kantor kelurahan dan kecamatan seperti, surat pengantar dari RT/RW, surat pengantar dari Desa, fotocopy KTP, kartu keluarga, dan surat pernyataan atau permohonan. Dokumen ini harus lengkap tidak boleh salah satunya tidak ada karena memang persyaratan yang harus dimiliki.”<sup>4</sup>

Dari wawancara Ibu Nadrah bahwa untuk pembuatan SKU (Surat Keterangan Usaha) ada persyaratan dokumen yang harus dilengkapi, dokumen-dokumen ini harus

---

<sup>3</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lempang, *wawancara* oleh penulis di Kantor Desa Lempang, Barru 9 September 2020.

<sup>4</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lempang, *wawancara* oleh penulis di Kantor Desa Lempang, Barru 9 September 2020.

dipenuhi oleh para pelaku usaha yang ingin membuat SKU dengan seluruh proses pembuatan tidak dikenakan biaya dari pemerintah setempat. Surat ini sangat wajib dimiliki, tanpa adanya surat keterangan usaha, perizinan usaha akan mengalami kendala nantinya. Sebagaimana dalam peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2014 tentang izin lingkungan pada Bab I Pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa izin usaha dan /atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

#### **4.1.2 Tidak Adanya Pemberian Retribusi Jasa Usaha Pada Masyarakat**

Pemerintah daerah Kabupaten Barru, tidak meminta retribusi jasa usaha kepada masyarakat yang membangun usaha kerajinan batu di daerah Desa Lempang Tampung Cinae.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah staf kantor Desa Lempang menyatakan bahwa:

“Dari awal adanya usaha kerajinan batu ini, pemerintah tidak meminta retribusi pada masyarakat karena tempat menjualnya juga didepan rumah masing-masing, kemudian tempat mengambil batu juga memang tanah sendiri dari masyarakat atau milik pribadi, mayoritas masyarakat disini memang pekerjaannya mengelolah atau pengrajin batu. Batu itu berkembang ditanah masyarakat dan tidak ada habisnya. Jadi mereka kalau mau mengambil batu tidak usah izin dari pemerintah lagi, yang pastinya kami hanya mengingatkan untuk mengelolah dengan baik tanpa merusak lingkungan.”<sup>5</sup>

Hasil wawancara bahwa sumber daya alam yang dimiliki Desa Lempang Tampung Cinae khususnya batu alam memang sangatlah melimpah dan dari sinilah masyarakat berupaya untuk mengelolanya karena mayoritas pekerjaan mereka sebagai pengrajin, setidaknya dengan usaha seperti ini bisa membantu ekonomi masyarakat, hal ini sangat membantu juga. Namun masyarakat harus memperhatikan lingkungan alam tanpa harus merusak supaya pengelolaan usaha tersebut bisa berkembang.

---

<sup>5</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lempang, wawancara oleh penulis di kantor Desa Lempang, Barru 9 September 2020.

### 4.1.3 Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan yang merupakan kegiatan pemerintah daerah khususnya di lingkungan masyarakat pengrajin Desa Lembang Tampung Cinae yang dilakukan oleh Dinas kesehatan daerah Kabupaten Barru, yang mempunyai tujuan dapat membuat para masyarakat khususnya para pengrajin lebih sadar akan pentingnya kesehatan diri dan penerapan pola hidup sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah staf kantor Desa Lembang menyatakan bahwa:

“Ada penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bersama puskesmas setempat, kesehatan pengrajin, kita tahu bahwa kalau mengerjakan satu produksi batu contohnya cobekan dengan menggunakan alat gerinda pasrti ada serbuk batu yang bisa masuk di hidung. Jadi ada penyuluhan kesehatan seperti kita periksa tekanan darah, atau ada pekerja yang terkena asma. Kita kasih tanya juga untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, masker, pelindung telinga, sepatu juga, karena biasanya pengrajin terkadang salah satunya dia lupa untuk memakainya.<sup>6</sup>

Jadi hasil wawancara bahwa pemerintah setempat melakukan peranannya dengan penyuluhandan pemeriksaan kesehatan serta keselamatan kerja untuk para pengrajin, hal ini juga sangat membantu masyarakat, dengan adanya penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan serta keselamatan kerja ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesehatan, karena pekerjaan apapun jenisnya dapat dipastikan pekerjaan akan mempunyai potensi bahaya yang bisa berdampak, baik itu berdampak pada kesehatan atau adanya kecelakaan kerja yang bisa menimpa pengrajin maupun orang sekitar. Maka memang dibutuhkan penyuluhan serta pendampingan kesehatan dan penyuluhan keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herawati, SE. Sebagai kepala seksi pengembangan IKM menyatakan bahwa:

“Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap sebulan sekali yang dilakukan oleh tim kesehatan di desa Lembang, yaitu puskesmas. Nantinya

---

<sup>6</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lembang, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Lembang, Barru 9 September 2020.

mereka memeriksa kesehatan para pengrajin, dan menjelaskan tentang keselamatan kerja yang harus selalu diterapkan oleh para pengrajin dan selalu di ingatkan agar tetap menjaga kesehatan dan keselamatan pada saat membuat suatu produksi kerajinan batu.”<sup>7</sup>

Hasil wawancara bahwa pemerintah daerah memberikan tugas kepada tim kesehatan puskesmas yang berada di Desa Lempang untuk melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan kepada para pengrajin, dan dilakukan setiap sebulan sekali, agar supaya pengrajin selalu mengingat tentang kesehatan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan membuat suatu produk kerajinan batu. Mengingat kesehatan dan keselamatan adalah hal yang paling utama bagi para pengrajin batu di Desa Lempang Tampung Cinae.

#### **4.1.4 Mempromosikan Hasil Karya Produksi Kerajinan Batu**

Pada awal tahun 2016 merupakan berlakunya pasar bebas masuk ke Indonesia, produk-produk dari Negeri tetangga akan masuk ke semua sektor pasar yang ada di Indonesia, dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) akan menimbulkan efek persaingan usaha yang ada di pasaran karena akan lebih bebas memasarkan produknya. Namun hal inilah yang menjadikan para pengusaha produksi lokal ikut bersaing dalam memasarkan hasil produksinya hingga keluar Negeri. Tapi harus adanya kontribusi yang besar untuk pengusaha lokal yang diberikan oleh pemerintahan. Pada sektor pemasaran usaha produk lokal batu tatakan Lempang Tampung Cinae, pemerintah daerah memfasilitasi dengan mempromosikan pada forum pameran baik tingkat kabupaten dan Nasional agar dapat meningkatkan pemasaran hasil produksi kerajinan usaha batu, ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sangat membantu serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di Desa Lempang Tampung Cinae.

---

<sup>7</sup>Herawati, Kepala Seksi Pengembangan IKM, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, *wawancara* oleh penulis di kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Barru 9 September 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herawati, SE. Sebagai kepala seksi pengembangan IKM menyatakan bahwa:

“Kami mempromosikan usaha kerajinan batu dengan cara mengikutkannya dipameran, dengan fasilitas pemasaran di pojok UMKM Kabupaten Barru yang setiap tahunnya di adakan di Alun-alun Kota Barru, dari sinilah kita bantu masyarakat untuk mempromosikan hasil produksi kerajinan batu.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara bahwa pemerintah memfasilitasi para pengrajin dengan cara mempromosikan hasil karya produksinya di Alun-alun kota Barru, nantinya banyak masyarakat yang melihat apa yang di pasarkan sehingga masyarakat yang berkunjung berminat untuk membelinya. Dengan membuatkan stan pojok UMKM maka para pengrajin bisa menjual dan mempromosikan hasil kerajinan yang dibuatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah staf kantor Desa Lembang menyatakan bahwa:

“Kalau ada pameran usaha kecil dan menengah kita ikutkan juga. BPD (Badan Pengembangan Desa) yang membawa, kita sampaikan ke penjual agar menyiapkan masing-masing satu produk untuk dipamerkan, karena kita punya produksi kerajinan batu berbeda dengan yang lain, contohnya saja cobekan yang punya desain yang unik model atau bentuk toko kartun, dan juga batu nisan desain dan warnanya sangat berbeda dengan daerah lain. Kemudian bahannya adalah batu asli tidak ada campuran semen, kita punya ciri khas sendiri yang masyarakat luar sudah tau kalau itu pasti dari daerah Barru yaitu produksi pengrajin Desa Lembang Tampung Cinae.”<sup>9</sup>

Hasil wawancara bahwa pemerintah mempunyai peran atau kontribusi dalam hal pemasaran kerajinan batu yang dilakukan masyarakat Lembang Tampung Cinae, seperti mengikutkan dalam kegiatan pameran usaha, karena desain yang berbeda dengan daerah lain. Dengan ini dapat mempertahankan eksistensi produk kerajinan lokal hingga Nasional sehingga, dapat meningkatkan mutu atau berkualitas, karena produk dari kerajinan batu seperti batu cobek mempunyai kualitas yang terbaik

---

<sup>8</sup>Herawati, Kepala Seksi Pengembangan IKM, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, *wawancara* oleh penulis di kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Barru 9 September 2020.

<sup>9</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lembang, *wawancara* oleh penulis di Kantor Desa Lembang, Barru 9 September 2020.

seperti, tidak mudah pecah atau rusak karena tidak ada campuran semen atau terbuat dari batu alam asli. Dan masyarakat mengetahui bahwa hasil produksi tersebut dari masyarakat Desa Lempang Tampung Cinae.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah staf kantor Desa Lempang menyatakan bahwa:

“Sudah banyak wartawan yang membantu juga dalam mempromosikan produk usaha lokal ini baik melalui media cetak dan tayangan distasiun televisi Nasional mereka datang untuk mewawancarai para pengrajin dan penjual, para wartawan itu mau mengetahui bagaimana cara pembuatannya dan kemudian di tayangkan, dari sini juga bisa kita jadikan ajang promosi kalau memang benar ada salah satu daerah, yaitu Kabupaten Barru yang masih eksis dalam pembuatan produksi lokal seperti batu cobek, meskipun kita mengetahui kalau zaman sekarang sudah modern, tapi masih banyak juga yang memilih untuk membelinya.”<sup>10</sup>

Hasil wawancara bahwa pemerintah memberikan izin dalam mempromosikan usaha kerajinan batu melalui wawancara dengan para media massa baik itu pada stasiun televisi Nasional. Sehingga produk lebih cepat dikenal dan diingat oleh orang-orang dari luar daerah Barru. Memberikan perhatian lebih dan menarik banyak peminat karena dapat dijangkau melalui penglihatan dan informasi yang diberikan. Apalagi televisi merupakan media yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan cukup diminati. Dengan adanya promosi melalui media televisi ini sangat membantu untuk mengembangkan usaha produksi lokal yang dibuat di daerah Kabupaten Barru.

Pada dasarnya semua masyarakat Lempang Tampung Cinae khususnya masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin dan penjual batu tatakan mengharapkan adanya pengaturan serta perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barru kepada usaha produksi lokal kerajinan batu yang ada di Lempang Tampung Cinae, melalui regulasi atau peraturan yang diberikan guna menjaga eksistensi usaha produksai lokal kerajinan batu tatakan. Karena hanya melalui

---

<sup>10</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lempang, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Lempang, Barru 9 September 2020.

regulasi khususlah industri akan tetap berjalan apa lagi sekarang banyak hal yang bisa membuat merosotnya usaha kerajinan batu. Kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah, semangat masyarakat terhadap usahanya akan terus tumbuh dan berkembang sehingga perekonomian daerah juga menjadi maju. Pemerintah yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan terhadap hak-hak masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu kerjasama serta kordinasi antara kedua belah pihak pemerintah setempat dan pengrajin serta penjual batu tatakan. Kordinasi inilah sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga eksistensi usaha produksi kerajinan batu tatakan yang ada didaerah Kabupaten Barru khususnya berada di Lembang Tampung Cinae Kecamatan Tanete Riaja. Apa lagi usaha produksi ini merupakan usaha lokal yang harus selalu diperhatikan dan merupakan ciri khas suatu daerah.

Dalam pengembangan usaha kerajinan batu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Lembang Tampung Cinae dibutuhkan bentuk peran seperti pelatihan dan bantuan peralatan untuk menjaga aspek sumber daya manusia sebagai salah satu acuan dalam menjaga eksistensi dari usaha kerajinan batu tatakan, namun melihat dari keadaan yang ada belum adanya pelatihan serta bantuan peralatan, ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah nantinya agar supaya pengrajin dan pengusaha industri kerajinan batu tatakan dapat memperbarui dan meningkatkan pengetahuan dan daya kreativitas seorang pengrajin dalam menciptakan suatu karya atau produk karena keadaan sekarang lebih modern jadi perlu adanya perubahan serta inovasi dan kegiatan yang bisa memajukan eksistensi dari usaha masyarakat.

Salah satu bentuk peran pemerintah yang perlu dilakukan dalam menjaga eksistensi usaha kerajinan batu yaitu dengan membentuk kemitraan, kelompok usaha atau organisasi yang dapat menaungi pelaku usaha industri kerajinan batu. Dengan adanya kemitraan yang dibuatkan oleh pemerintah daerah akan memberikan dukungan dan perhatian penuh kepada masyarakat. Dalam hal ini setiap pihak bisa saling membantu seperti memberikan bantuan pendanaan atau modal, menyediakan

sarana dan prasarana dalam hal pemasaran atau promosi produk. Sehingga dengan bentuk peran seperti ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau ekonomi daerah di Kabupaten Barru.

#### **4.2. Tanggapan Pengrajin Dan Penjual Terhadap Bentuk Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Usaha Kerajinan Batu Di Lempang Tampung Cinae Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru**

Bentuk peran pemerintah sangatlah di butuhkan oleh para pengrajin maupun penjual dari usaha kerajinan batu tatakan, karena pemerintah harus bisa mengembangkan daerahnya masing-masing yang bertujuan untuk kepentingan masyarakatnya terutama masalah ekonomi, pruduk dari ciri khas daerah harus di pertahankan. Adanya perkembangan daerah yang semakin pesat di harapkan dapat meningkatkan pula perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Adhan, salah satu pengrajin batu menyatakan bahwa:

“Dari dulu sampai sekarang pekerjaannya jadi pengrajin, sudah 30 tahun lamanya tidak ada pekerjaan lain. Menurut ku bentuk peran pemerintah itu masih kurang. Kita mau kalau kelompok pengrajin di kasih aktif lagi, tidak berhenti. Kemarin itu ada kelompok pengrajin namanya tunas mulia. Tapi cuman berjalan beberapa bulan baru tidak aktif lagi. Jadi kita bekerja masing-masing saja ji, padahal kalau mau di pikir toh bagus itu kalau ada kelompok pengrajin nanti bisaki di bantu kelolah oleh pemerintah.”<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Adhan mengatakan bahwa bentuk peran pemerintah masih belum efektif, pemerintah harus memberikan dukungan penuh atau peran terhadap usaha produksi batu tatakan terutama dalam pengelolaan di bidang kelompok pengrajin, kelompok pengrajin yang hanya berjalan sebentar. Tidak adanya kordinasi yang baik sehingga para pengrajin menginginkan adanya pengelolaan secara terus menerus, agar mereka terbantu dalam mengelolah dan pemerintah juga menjalankan perannya, nantinya dengan adanya kelompok pengrajin ini bisa

---

<sup>11</sup>Adhan, Pengrajin batu, wawancara oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 12 September 2020.

membentuk kerjasama antara para pengrajin untuk pengembangan dari kerajinan batu, terutama dalam hal pembuatan kerajinan. Sehingga meningkatkan kualitas hasil produksi yang di buatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Adam, salah satu pengrajin batu menyatakan bahwa:

“Kita pengrajin butuh sekali pembinaan atau pelatihan apa lagi batu gunung yang di gunakan ini berkualitas bagus tidak mudah rusak, misalnya saja toh pemerintah itu kasih datang orang yang pintar membuat desain yang bagus supaya kita juga merasa di dukung oleh pemerintah. tapi biasa ji juga ada seperti penyuluhan kesehatan dari puskesmas, sebagian dari teman-teman itu ada yang diperiksa kesehatannya. Sudah 20 tahun saya kerja sebagai pengrajin, pendapatan juga tidak tetap, jadi kita semua pengrajin di sini berharap di lihat juga sama pemerintah.”<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan pak Adam bahwa para pengrajin menginginkan pemerintah mengadakan pembinaan atau pelatihan, apa lagi bahan baku untuk pembuatan produksi berkualitas baik atau tidak mudah rusak, dengan mendatangkan ahli dari pembuatan kerajinan batu, seperti seniman, pelatihannya nanti bisa dalam hal pengembangan produksi misalnya inovasi desain. karena ini merupakan bentuk peran pemerintah sebagi faktor pendukung untuk para pengrajin, agar dapat memajukan dan mempertahankan pengelolaan dari usaha produksi batu tatakan. Namun pemerintah sudah melakukan salah satu bentuk perannya yaitu dengan mengadakan penyuluhan kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas di kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Heri, salah satu pengrajin batu menyatakan bahwa:

“Kalau ekonomi meningkat atau tidak itu, bisa kita bilng ekonomi cukup meningkat namun tergantung dari penjualan juga kalau banyak yang beli yah penghasilan juga banyak. Ini batu di ambil dari gunung, Untuk Kawasan wilayah mengambil batu itu, kita punya tanah masing-masing jadi tidak perluh minta izin dari pemerintah setempat, masing-masing kelolah miliknya.

---

<sup>12</sup>Adam, Pengrajin batu, *wawancara* oleh penulis di Desa Lembang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 12 September 2020.

Karena tidak ada juga kelompok pengrajin. untung juga pemerintah tidak minta ji pembayaran seperti pajak jadi kira-kira ada ji sedikit bantuannya, di tanya ki saja untuk jaga lingkungan atau tempat ta kelola ini batu, karena kalau tidak, bisa merusak alam. Memang harus di jaga karena penghasilanya semua pengrajin lebih banyak dari mengelolah hasil alam yaitu dari batu.”<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Heri bahwa peningkatan ekonomi masyarakat masih tergolong ekonomi menengah, karena tergantung dari penjualan hasil produksinya, kalau penjualan banyak maka, pendapatan juga akan meningkat, kemudian untuk mengambil batu tatakan untuk di jadikan suatu produksi atau karya kerajinan tidak perluh meminta izin pada pemerintah setempat, karena batu tatakan di ambil di kawasan wilayah pengrajin masing-masing namun pemerintah hanya selalu mengingatkan untuk lingkungan pengelolaan selalu di jaga dengan baik, agar tidak merusak lingkungan, dan batu tatakan harus di pergunakan sebaik-baiknya. Pemerintah juga tidak meminta pajak pada para pengrajin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Nur Ardiyansyah, salah satu pengrajin batu menyatakan bahwa:

“Tidak ada pekerjaan lain selain menjadi pengrajin, Alhamdulillah keperluan sehari-hari bisa tercukupi, Untuk modal itu ada bantuannya berupa uang Tunai, namun modal itu bukan saja berupa uang yang di kasihkan ki, tapi harapannya ada juga alat produksi seperti alat produksi yang kita gunakan di sini pahat ukir atau amplas, kalau ada bantuan seperti amplas saja sudah bersyukur sekalimi kita pengrajin, alat seperti mesin gerinda, mesin ukir itu sebagian ada yang milik pribadi ada juga tidak. Untuk listriknya juga kita bayar masing-masing pake token listrik. Harapannya yah kita ada bantuan sedikit lah, supaya kita semangat juga karena di dukung oleh pemerintah.”<sup>14</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Nur Ardiyansyah bahwa menjadi pengrajin dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemberian modal dari pemerintah masih berupa uang tunai, menurutnya modal bukan saja tentang pemberian uang namun peralatan pembuatan karya produksipun termasuk pemberian modal, karena belum

---

<sup>13</sup>Heri, Pengrajin batu, *wawancara* oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 12 September 2020.

<sup>14</sup>Nur Ardiyansyah, Pengrajin batu, *wawancara* oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 12 September 2020.

adanya bantuan modal berupa alat produksi yang diberikan, para pengrajin berharap mereka di perhatikan oleh pemerintah karena dengan adanya bantuan dari pemerintah bisa membuat mereka menjadi semangat dalam bekerja dan menghasilkan produksi dengan hasil yang terbaik, salah satu penunjang dari produksi kerajinan adalah alat dengan teknologi yang mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Baharuddin, salah satu pengrajin batu menyatakan bahwa:

“Kita bapak-bapak yang kerja disini sudah ada yang sampai 50 tahun bekerja sebagai pengrajin, berharap ada perlindungan dari pemerintah seperti peraturan-peraturan yang melindungi hak pengrajin, supaya ada kelangsungan terus-menerus, pengembangan desainnya juga, contohnya ukiran batu nisan kita disini itu sangat berbeda dengan ukiran dari produksi dari luar, disini ada mengukir motif Allahu, Tulisan Al-Qur’an bermotif bunga, hiasan tulisan huruf dan angka kita punya ciri khas sendiri.”<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Baharuddin bahwa para pengrajin menginginkan adanya kebijakan atau peraturan pemerintah mengenai perlindungan hak pengrajin, sehingga bisa menjaga kelangsungan dari usaha produksi kerajinan batu, dan menunjukkan kepedulian serta perhatian pemerintah daerah kepada seluruh pengrajin yang ada di Desa Lempang Tampung Cinae, terutama dalam desainnya karena desain kerajinan batu disana mempunyai ciri khas yang sangat berbeda dengan daerah yang lain, mulai dari ukiran motifnya serta warna yang di pergunakan, hal inilah yang menjadi bentuk peran pemerintah daerah agar supaya terhindar dari adanya plagiatisme yang di lakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Baharuddin, salah satu pengrajin batu menyatakan bahwa:

“Rata-rata masyarakat disini beragama Islam, kalau menurut saya pemerintah sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam membantu perekonomian masyarakat, dilihat dari tanggung jawabnya dalam pemberian

---

<sup>15</sup>Baharuddin, Pengrajin batu, *wawancara* oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 12 September 2020.

pelayanan, semua pasti atas dasar dari Allah swt untuk jadi pemimpin yang baik, untuk kesejahteraan masyarakatnya.”<sup>16</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Baharuddin bahwa pemerintah sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, di lihat dari pelayanan yang di berikan pemerintah kepada pengrajin seperti pelayanan dalam pembuatan surat keterangan usaha, menurutnya pemerintah sudah bertanggung jawab dalam pelayanan yang merupakan bentuk peran dari pemerintah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati (Mutiara 89), salah satu penjual batu tatakan menyatakan bahwa:

“Sudah sekitar 10 tahun saya menjadi penjual batu tatakan, rata-rata juga penjual di sini pasti punya izin usaha kalau mau buat usaha, para penjual di sini menjual batu nisan, pallangga bola, batu cobek. Untuk modal ta kita di sini nak, banyak-banyak penjual ambil pinjaman dari koperasi atau bank, kita buat saja surat keterangan usaha. Pemerintah yang bantu ki urus dan gratis, nanti ini surat keterangan usaha yang kita punya jadi bukti kalau punya ki usaha menjual, atau bisa di bilang jadi jaminan untuk ambil modal.”<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati bahwa para penjual harus mempunyai isin usaha dari pemerintah setempat, pembuatan SKU (Surat Keterangan Usaha) merupakan fasilitas administratif yang di berikan oleh pemerintah daerah, pengurusannya itu secara gratis atau tidak menggunakan biaya, serta pemerintah juga memberikan kemudahan dalam kepengurusannya, tujuan dari adanya surat keterangan usaha ini agar terlindungi dari berbagai praktek usaha yang tidak jujur dan para penjual juga memiliki hak kepemilikan dari usahanya. Dengan adanya surat keterangan usaha ini agar dapat mempermudah para penjual dalam mengakses pinjaman modal baik itu di koperasi daerah atau pun di bank karena persyaratan yang di butuhkan dalam mengambil modal adalah dengan adanya surat keterangan usaha.

---

<sup>16</sup>Baharuddin, Pengrajin batu, *wawancara* oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 12 September 2020.

<sup>17</sup>Rahmawati, Penjual batu tatakan usaha Mutiara 89 *wawancara* oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 13 September 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Akni Saputra (Usaha 2 Putra), salah satu penjual batu tatakan menyatakan bahwa:

“Usaha kerajinan batu ini sudah lama di rintis, dan lokasi untuk menjual memang di depan rumah masing-masing, yah di sini emperan-emperan rumah, ada juga yang rumahnya tidak di pinggir jalan, jadi makanya dia titip barangnya untuk di jualkan, dan syukurnya pemerintah daerah tidak minta retribusi atau pajak dari usaha kita ini. Kalaupun nantinya ada kemungkinan besar pasti kita bayar kalau memang kita diwajibkan, tapi kita semua berharap bayarannya tidak terlalu mahal supaya kita juga tidak merasa terbebani, tapi syukurnya belum ada dari pihak pemerintah yang menyuruh.”<sup>18</sup>

Hasil wawancara dengan pak Akni Saputra bahwa dari awal pembuatan usaha yang di rintis para penjual, menjual produksi kerajinan batu tatakannya di emperan-emperan rumah atau depan rumah, sampai saat ini pemerintah belum membuat peraturan tentang adanya retribusi atau pembayaran pajak usaha namun, jika nantinya pemerintah membuat peraturan tersebut maka mereka pasti akan membayarnya dengan harapan para pengrajin bahwa pemerintah mempertimbangkan berapa kisaran yang harus di bayarkan dan para penjual tidak merasa terbebani akan adanya pajak atau retribusi tersebut nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musdalifa (Kios Fitri), salah satu penjual batu tatakan menyatakan bahwa:

“Kita penjual disini nak, sudah punya langganan masing-masing, ada dari Barru memang, kalau di luar daerah itu ada dari Makassar, Maros, Bone, Pangkep, Soppeng, dan Sengkang. Setiap minggunya pasti ada yang datang untuk ambil pesannya. Ada juga dari Sulawesi Tengah yaitu Morowali, kalau yang dari luar daerah itu keluarga yang kasih tanya kalau kita punya usaha produksi batu, Alhamdulillah pemerintah di sini juga Nak bantu jeki dengan mempromosikan kita punya usaha kerajinan batu dan na ikutkan ki juga di pameran di tingkat Kabupaten.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Akni Saputra, Penjual batu tatakan usaha 2 Putra *wawancara* oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 13 September 2020.

<sup>19</sup>Musdalifa, Penjual batu tatakan usaha Kios Fitri *wawancara* oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 13 September 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Musdalifa bahwa pemerintah sudah melakukan perannya dengan mempromosikan produk usaha kerajinan batu, salah satu strategi pemasaran yaitu dengan adanya promosi, promosi ini bagian kegiatan yang dilakukan penjual yang di bantu oleh pemerintah untuk memberitahukan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan para konsumen untuk membelinya, melakukan kegiatan promosi akan memperluas jaringan pemasaran dan mempermudah masyarakat dalam mengetahui bahwa ada usaha yang di lakukan masyarakat di Lempang Tampung Cinae yaitu usaha batu tatakan, tidak hanya promosi dari pameran dan media sosial, tetapi juga promosi dari konsumen yang langsung ke tempat untuk membelinya dan memberikan informasi kepada orang-orang. dari sinilah nantinya tingkat pemasaran semakin meluas dan bisa membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, serta ekonomi di daerah Barru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi NUSDALIANA (Arya Mandiri), salah satu penjual batu tatakan menyatakan bahwa:

“Pendapatan yang kita peroleh tidak menentu tergantung dari pesanan, kalau perekonomian meningkat atau tidak yah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kasih sekolah anak-anak ta. seperti batu Nisan itu mulai harga 600.000 sampai 40.000.000 tergantung ukurannya, kalau batu Cobek itu yang polos 50.000 kalau palungeng 85.000 yang berkarakter, jadi biasa dalam sebulan itu bisa untung besar bisa juga tidak. Kita jual juga melalui pesanan Online, harapannya pemerintah mendukung dan mendorong kita punya usaha dalam bentuk kerjasama dengan pihak yang terkait dengan selalu saling menguntungkan.”<sup>20</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Andi NUSDALIANA bahwa pendapatan yang diperoleh tergantung dari penjualan atau pesanan, namun cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anaknya. Harga jual satu produksi pun tergantung dari ukurannya Kemudian para penjual usaha kerajinan batu tatakan berharap adanya bentuk peran pemerintah dalam hal kemitraan atau kerjasama, di mana kegiatan atau usaha yang di lakukan beberapa pihak secara bersama-sama

---

<sup>20</sup>Andi NUSDALIANA, Penjual batu tatakan usaha Arya Mandiri wawancara oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 13 September 2020

dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu. Tujuan dari adanya kemitraan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maka sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam pengembangan usaha masyarakat, agar terkolala dengan baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muliati (Usaha Nur Anisa), salah satu penjual batu tatakan menyatakan bahwa:

“Saya menjual disini dari Tahun 1995, suami saya kerjanya sebagai pengrajin, saya membantu tahap terakhirnya setelah dia buat saya yang cat, kasih model seperti Doraemon, Hellokitty, dan model kartun lainnya, supaya terlihat menarik dan banyak yang berminat untuk beli, ada juga pembeli yang meminta dibuatkan sesuai dengan bentuk yang dia mau. Harapannya kita mau pemerintah mengadakan pelatihan seperti mencari desain baru untuk karya produksi lokal kami, kita juga berharap kalau pemerintah setempat memberikan pembelajaran misalnya bagaimana cara mengelolah modal dengan baik.”<sup>21</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Muliati bahwa sebagian penjual kerajinan juga merupakan pengrajin batu tatakan, mereka berharap adanya pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah, agar suatu produk kerajinan usaha memiliki nilai jual yang tinggi, tentunya pemerintah harus membantu menciptakan inovasi yang unik serta menarik di salah satu produk unggulannya seperti pelatihan dalam mencari desain baru dan warna yang di sesuaikan trend yang ada dikalangan masyarakat, serta menggunakan perpaduan warna disetiap produknya, selain hal ini inovasi dengan desain model sendiri yang di inginkan tidak hanya datang dari pemerintah atau pun pengrajin saja namun bisa dari konsumen atau pembeli yang mampu membuat para pembeli berminat atau tertarik untuk membeli produk hasil kerajinan batu tatakan. Dan pembeli merasa puas atas hasil produksi yang sudah dia beli. Tidak kalah penting yaitu pelatihan dalam pengelolaan modal usaha terutama dalam pengeluaran

---

<sup>21</sup>Muliati, Penjual batu tatakan usaha Nur Anisa wawancara oleh penulis di Desa Lempang Tampung Cinae, Kecamatan Tanete Riaja, Barru 13 September 2020

biaya produksi agar masyarakat khususnya penjual batu tatakan mempunyai wawasan mengenai manajemen usaha.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para pengrajin dan penjual batu tatakan yang mengungkapkan bahwa dengan adanya kegiatan pembuatan produksi kerajinan batu, tingkat kesejahteraan cukup meningkat, hal ini dikarenakan kegiatan usaha batu tatakan ini sangat membantu perekonomian masyarakat, dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anaknya. Pekerjaan masyarakat di Lempang Tampung Cinae mayoritas pengrajin dan penjual batu tatakan. Kemudian dari beberapa pendapat para pengrajin dan penjual batu tatakan yang mengungkapkan bahwa bentuk peran pemerintah sudah cukup membantu dalam mengembangkan usaha produksi batu tatakan, dilihat dari tanggung jawab pemerintah yang sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi layanan, dan fungsi pengaturan namun peranannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengembangan usaha batu tatakan ini untuk lebih meningkatkan kesejahteraan.

#### **4.3. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pengrajin dan Penjual Batu Tatakan di Lempang Tampung Cinae Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru.**

Pada dasarnya ekonomi dalam Islam yaitu harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan serta memberikan kesempatan kepada manusia dalam melakukan usaha demi kelangsungan kehidupannya. Pemerintahan yang menjalankan perannya terhadap perkembangan ekonomi pada masyarakatnya harus bisa mengikuti aturan-aturan yang di buat baik itu aturan yang sudah ada dalam instansi pemerintahan itu sendiri, serta aturan-aturan Allah swt yang menciptakan Alam semesta terutama manusia, mereka harus bisa menjalankan perannya sebagai pihak pelaksana instansi pemerintahan. Manusia perlu meyakini bahwa hanya Allah swt, yang berkuasa menentukan nasib manusia terutama mengenai kaidah dan harapan mereka dalam memanfaatkan isi alam semesta ini, manusia di berikan peranan sebagai pemegang amanah dalam mengelola harta Allah swt, yang berada di tangan mereka. Inilah

yang di maksud Allah dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu adalah khalifah Allah di muka bumi ini.

sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S Al-An'am/6:165

لِيَبْلُوكُمْ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضٍ مِّنْكُمْ وَرَفَعِ الْأَرْضِ حَلِيفَ جَعَلَكُمُ الَّذِي وَهُوَ  
رَحِيمٌ لِّغَفُورٍ وَإِنَّهُ الْعِقَابُ سَرِيعٌ رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ مَا فِي

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>22</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt yang menjadikan manusia penguasa-penguasa di bumi untuk mengatur kehidupan rakyatnya dan dia pulalah yang meninggikan derajat sebagian mereka dari sebagian lainnya. Semua itu adalah menurut sunnahtullah untuk menguji mereka masing-masing bagaimana mereka menyikapi karunia Allah swt yang di berikan kepadanya. Mereka akan mendapat balasan dari ujian itu, baik di dunia maupun di akhirat penguasa-penguasa diuji keadilan dan kejujurannya, orang kaya diuji bagaimana dia membelanjakan hartanya, orang miskin diuji dengan kesabarannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh iri hati dan dengki dalam pemberian Tuhan kepada seseorang, karena semua itu dari Allah swt. dan semua pemeberian-Nya adalah ujian bagi setiap orang.

Sebagai khalifah Allah yang di berikan amanah mengurus bumi dan jagad raya ini, manusia semestinya mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Sejauh mana manusia dapat melaksanakan tugas ini dan mematuhi perintah Allah swt adalah senantiasa di nilai

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-An'am (6) ayat 165, (Jakarta: Lembaga percetakan Al-Qur'an Raja Fahd 1971), h. 217.

oleh Allah sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Orang yang beriman akan senantiasa berusaha untuk melaksanakan tugasnya sesempurna mungkin dengan berdasarkan kepada perintah dan peraturan Allah. Manusia tidak boleh membuat peraturan mereka sendiri yang bertentangan dengan peraturan Allah dalam mengelolah alam semesta dan diri sendiri.<sup>23</sup>

Hukum ekonomi Islam yang sudah menjadi ketentuan di dalam syara', mempunyai prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi oleh seseorang apabila adanya interaksi antar sesama manusia yang akan berkaitan dengan harta dan kepemilikan yang akan dilakukan oleh manusia. Prinsip inilah yang semestinya dijadikan sebagai acuan atau aturan dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

#### 4.3.1 Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Prinsip pertama ini, merupakan pondasi hukum Islam, dasar dari semua aktivitas kehidupan manusia. Terutama yang menekankan tentang harta benda yang di miliki manusia hanyalah amanah dari Allah swt, dan untuk memperoleh dan mengelolanya diperlukan cara yang di ridohi oleh-Nya dengan sebaik-baiknya, agar mendapatkan kemanfaatan dan karunia oleh sang pencipta. Sebagai khilafah Allah, pemerintah harus bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan dengan selalu berprinsip bahwa hal-hal apa pun yang dikerjakan akan selalu di lihat oleh Allah swt dan akan di pertanggung jawabkan di akhirat. Pemerintah harus menjadi pemimpin yang selalu sesuai dengan norma yang berlaku dan aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

---

<sup>23</sup>Miftaul Ulum, *Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 10 No 1, 2017, h. 63-67.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah Staf kantor Desa Lempang menyatakan bahwa:

“Apapun yang dikerjakan pasti harus selalui mengingat Allah, bekerja adalah ibadah, termasuk dalam aktivitas pemerintahan, merupakan amanah dari Allah swt, apa lagi menyangkut kesejahteraan masyarakat pada bidang ekonomi.”<sup>24</sup>

Aktivitas apapun yang dikerjakan wajib mengingat Allah swt. Terlebih lagi pemerintahan, yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mampu membuat aturan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Termasuk dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia ini. Namun lebih jauh dari itu di mana kesejahteraan yang akan dihasilkan adalah kesejahteraan manusia di dunia dan juga kesejahteraan manusia di akhirat.

Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt. Sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt, dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah*) atau tauhid dalam usaha sangat isensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.<sup>25</sup> Dengan ini sangat dibutuhkan pemerintah yang melakukan perannya harus sesuai dengan prinsip ketuhanan (*Ilahiyah*) atau ketauhidan. Sebagai khilafah Allah swt pemerintah harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka mereka wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt.

---

<sup>24</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lempang, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Lempang, Barru 9 September 2020.

<sup>25</sup>Mohammad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, h. 148.

#### 4.3.2 Prinsip Maslahat

Maslahat merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan kata *mafsadat* (kerusakan). Adapun secara majas (kiasan), kata ini dapat juga di gunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kemaslahatan adalah tujuan dari pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah Staf kantor Desa Lempang menyatakan bahwa:

“Salah satu peran pemerintah yang memberikan manfaat langsung dengan masyarakat yaitu dengan dilakukannya penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini merupakan peran yang sangat penting yang dilakukan pemerintahan terhadap masyarakat khususnya pada pengrajin produksi batu tatakan.”<sup>26</sup>

Setiap kegiatan yang menunjukkan peran pemerintah harus mempunyai manfaat bagi masyarakat, kegiatan yang menyangkut terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, dan harta benda. Pemeliharaan kelima macam kebutuhan tersebut, memerlukan usaha dari pemerintah untuk memberikan kebijakan atau peraturan-peraturan yang memang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti halnya di Desa Lempang Tampung Cinae, pemerintah membuat penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja kepada para pengrajin. Banyak manfaat yang bisa di dapatkan seperti mengetahui bagaimana kesehatan para pengrajin serta memberikan pemahaman tentang keselamatan kerja.

Masyarakat bisa menarik manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemaslahatan terkait dengan keadilan serta kesejahteraan yang menciptakan kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan masyarakat serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum. Dan dengan peran pemerintah yang mengadakan penyuluhan keselamatan kerja bagi pengrajin sudah sesuai dengan prinsip maslahat. Pemimpin harus selalu bisa memberikan yang terbaik bagi

---

<sup>26</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lempang, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Lempang, Barru 9 September 2020

masyarakatnya dalam hal apa pun, memenuhi hak-hak untuk masyarakat. Karena merupakan tugas dari pemimpin yang menyangkut amanah dari Allah swt.

#### 4.3.3 Prinsip Keadilan

Prinsip ini merupakan prinsip yang mencakup seluruh aspek kehidupan, terutama dalam hal peran pemerintahan yaitu dalam bidang ekonomi. Adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syariah makanih*).<sup>27</sup> Menegakkan keadilan merupakan tujuan paling utama dalam risalah Rasulullah saw serta para sahabat. Pemerintah harus bisa berlaku adil pada semua masyarakat, seperti masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya alam untuk kesejahteraan apa lagi dalam menciptakan suatu usaha produksi yang sesuai dengan kemampuan dari masyarakat. Dalam ekonomi tidak baik memiliki perilaku yang mementingkan diri semata-mata tanpa memikirkan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah Staf kantor Desa Lempang menyatakan bahwa:

“Kita sampaikan kepada semua para pengrajin dan penjual bahwa kalau ada acara pameran, dan untuk memberikan satu hasil karya produksi batu supaya dipamerkan. Kita kasih kesempatan semua untuk memperlihatkan hasil produksi tanpa membedakan atau tanpa pengecualian.”<sup>28</sup>

Pemerintah memberitahukan kepada masyarakat khususnya pengrajin dan penjual tentang adanya pameran untuk mempromosikan usaha produksi kerajinan batu tatakan, di sampaikan kepada semuanya, tanpa memilih satu atau hanya dua pengrajin atau penjual hal ini dilakukan pemerintah agar mereka tidak merasa adanya ketidakadilan atau kezaliman. Sesuai dengan perannya pemerintah harus bisa berbuat adil kepada masyarakat agar dapat memberikan kesejahteraan, terutama yang

---

<sup>27</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 13.

<sup>28</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lempang, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Lempang, Barru 9 September 2020.

menyangkut tentang bidang ekonomi. Semua peraturan atau kebijakan yang diberikan harus diberitahukan tanpa pengecualian.

Keadilan dalam masyarakat yang mana mereka berhak untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Sesungguhnya perintah untuk melaksanakan keadilan dinyatakan berkali-kali dalam Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai istilah seperti 'adl, qist, mizan dan sejenisnya. Hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya usaha menegakkan keadilan itu karena dengan berperilaku adil akan menjadikan seseorang lebih dekat dengan taqwa.<sup>29</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S Al- Maidah/5:8

بِنَّانِ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهِدَ آءَ لِلَّهِ قَوْمٍ مِّنْ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
بِمَا خَيْرٌ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّتَّقَوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شِد  
تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>30</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban berbuat adil bagi orang yang beriman. Orang yang adil lebih mudah mencapai ketaqwaan kepada Allah swt. Dalam ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa

<sup>29</sup>Miftaul Ulum, *Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 10 No.1, 2017, h. 72-73.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Maidah (5) ayat 8, (Jakarta: Lembaga percetakan Al-Qur'an Raja Fahd 1971), h. 159.

sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.<sup>31</sup>

Sama halnya dengan program bantuan program pemerintah, apabila pemerintah dalam hal upaya mendorong kesejahteraan masyarakat di upayakan tetap dalam wilayah dan komitmen yang adil. Karena sesungguhnya bila pemerintah berupaya menciptakan kehidupan yang sejahtera namun tidak di dasari pada sasaran yang adil maka akan sulit mewujudkan hal tersebut karena pemerataan hak masyarakat tidak terpenuhi.

#### 4.3.4 Prinsip *Al-mas'uliyah* (*accountabilit*)

Prinsip *al-mas'uliyah* atau prinsip pertanggung jawaban, prinsip ini meliputi berbagai aspek, yang meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, maupun pertanggung jawaban dalam masyarakat. Pemerintah harus mempunyai rasa tanggung jawab penuh dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, apa lagi yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah Staf kantor Desa Lempang menyatakan bahwa:

“Kita punya tanggung jawab dalam pembuatan SKU (Surat Keterangan Usaha), ini merupakan kewajiban kami agar dapat di pergunakan untuk kepentingan usaha, terutama dalam pengambilan modal usaha.”<sup>32</sup>

Pemerintah bertanggung jawab atas kepengurusan dalam pembuatan Surat Keterangan Usaha yang ingin dibuat oleh para penjual batu tatakan, pemerintah harus bisa membantu dan menjalankan perannya sebagai pemimpin. Hal ini dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh surat keterangan dan administrasi lain seperti perizinan usaha produksi batu tatakan. Pembuatan surat keterangan usaha ini nantinya akan dipakai dalam memperoleh bantuan-bantuan berupa modal untuk usaha masyarakat dan dapat membantu meningkatkan usaha dan perekonomian mereka.

<sup>31</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 233

<sup>32</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lempang, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Lempang, Barru 9 September 2020.

*Al-mas'uliyah* adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus di waspadai, bukan nikmat yang harus di syukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus di penuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus di pertanggung jawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus di pertanggung jawabkan di depan Allah swt.

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa penguasa merupakan wakil Allah dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (*al-mas'uliyah*) ini diharapkan masing-masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian pemimpin atau penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al-ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.<sup>33</sup>

#### 4.3.5 Prinsip Perwakilan atau Pemerintah (*Khalifah*)

Manusia adalah wakil Allah swt dimuka bumi. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Pemerintah diberikan amanah oleh Allah swt dan masyarakat sebagai pemimpin. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah di laksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia dan beserta isinya ini adalah amanah dari Allah swt kepada manusia. Manusia adalah *Khalifah* Allah di bumi yang ditugaskan mengelolah dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah swt.

---

<sup>33</sup>Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, jurnal Ilmiah Universitas Bataghari Jambi, Vol.17 No.2, 2017 h. 30.

Menurut Ahmad Musthafa Al-maragi, kata khalifah memiliki dua makna. Pertama, adalah pengganti, yaitu pengganti Allah swt. untuk melaksanakan titah-Nya di muka bumi. Kedua, manusia adalah pemimpin yang kepadanya diserahi tugas untuk memimpin diri dan makhluk lainnya serta memakmurkan dan mendayagunakan alam semesta bagi kepentingan manusia secara keseluruhan, dapat di pahami bahwa tugas manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah yang di artikan sebagai pengganti Allah dan juga di artikan sebagai pemimpin. Manusia dikatakan pengganti Allah adalah dimana manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri, karena alam semesta memang di ciptakan Allah untuk manusia. Pada dasarnya akhlak yang di ajarkan Al-Qur'an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah, yang sebagaimana Allah swt telah memberikan mandat kepada manusia menjadi penguasa untuk mengatur bumi dan segala isinya. Ke semua ini merupakan "Kekuasaan" dan wewenang yang bersifat umum yang diberikan Allah kepadanya sebagai khalifah untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Oleh karenanya, tanggung jawab moral manusia untuk mengelolah dan memanfaatkan seluruh sumber-sumber yang tersedia di alam ini guna memenuhi keperluan hidupnya. Namun kewenangan manusia untuk memanfaatkan alam semesta harus di dasarkan kepada garis yang telah ditetapkan Allah swt dan tidak boleh menyalahinya.<sup>34</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S Shaad/38:26

الْهَوَى تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَا حُكْمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يَدَا أوردُ  
سُوَابَمَا شَدِيدًا عَذَابٌ لَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِلُّكَ

الْحِسَابِ يَوْمَ ذَ 

<sup>34</sup>Al- Rasyidin, Samsul Nizar, *Filsafat pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan praktis*, Cet. II, (Jakarta: PT. Ciputat Press), h. 18-19.

Terjemahnya:

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”<sup>35</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kekhalifahan yang di anugerahkan kepada Nabi Daud a.s. berkaitan dengan kekuasaan dalam mengelolah wilayah tertentu atau kekuasaan politik, dan ini merupakan perintah dari Allah swt. kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran yang di turunkan dari sisi-Nya, para penguasa diberi peringatan agar mereka tidak mengikuti hawa nafsunya dan janganlah mereka menyimpang darinya, yang berakibat mereka akan sesat dari jalan Allah. Allah swt, telah mengancam orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan yang melupakan hari perhitungan, yaitu dengan ancaman yang tegas dan azab yang keras.

Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi sesama manusia dan pemerintah memainkan peranan penting untuk menjaga keharmonisan itu, termasuk dalam bidang ekonomi agar berjalan dengan benar tanpa ada kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk menguasai kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi tetapi tidak mampu dilakukan oleh para individu.<sup>36</sup> Meskipun yang sebenarnya yang memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi adalah individu karena mereka diberi kebebasan dan mereka pula yang akan mempertanggung jawabkan di akhirat kelak. Hal ini seiring dengan adanya pihak

---

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Shaad (38) ayat 26, (Jakarta: Lembaga percetakan Al-Qur'an Raja Fahd 1971), h. 736.

<sup>36</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 14.

individu yang menyeleweng atau tidak sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai Islam dalam melakukan kegiatan usaha karena akibat kurangnya iman dan ilmu mereka. Pemerintah harus bisa mengendalikan masalah apabila terjadi di masyarakat dalam hal usaha produksi yang dilakukan. Demi menjaga kepentingan masyarakat luas. Demikian juga dalam hal perencanaan dan pembentukan dasar-dasar ekonomi perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan keutamaan kegiatan produksi dengan mengikuti situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Pelaksanaan kegiatan ekonomi adalah diserahkan ke masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah lebih bertindak sebagai pembantu dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat serta sebagai pengawas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadrah Staf kantor Desa Lempang menyatakan bahwa:

“Kita membantu apabila dalam pengelolaan usaha ada masalah, seperti izin usaha, pemberian kebijakan-kebijakan atau membuat aturan-aturan yang tidak merugikan masyarakat.”<sup>37</sup>

Pemerintah daerah memang harus bertanggung jawab dalam hal peningkatan ekonomi masyarakatnya. Terlebih dalam hal izin usahanya. Serta pemberian kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang terkait dengan peningkatan ekonomi di daerah. Segala perbuatan harus di pertanggung jawabkan kepada Allah di hari kemudian, terutama wakil Allah yaitu *Khalifah* atau pemerintah. Pemerintah harus bisa mengikuti perkembangan ekonomi masyarakatnya dan memperhatikan usaha yang di lakukan masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Kesejahteraan harus dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Barru telah melakukan peranannya serta melaksanakan kewajibannya yang berfungsi sebagai pengatur usaha produksi kerajinan batu tatakan dan berfungsi sebagai pemberi layanan atau fasilitas dalam meningkatkan usaha produksi kerajinan batu tatakan.

---

<sup>37</sup>Nadrah Kadir, Staf Kantor Desa Lempang, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Lempang, Barru 9 September 2020.